

KOMUNIKASI POLITIK ULAMA DAYAH DALAM PILKADA ACEH TAHUN 2024

Zulfikar Arahman

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI Smalaanga, Bireuen Aceh, Indonesia)
Email: zulfikar@unisai.ac.id

*Zulfikar Arahman

Submitted: dd-mm-yyyy, Revised: dd-mm-yyyy, Accepted: dd-mm-yyyy

ABSTRAK

Ulama dayah di Aceh memiliki peran sentral dalam membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat melalui legitimasi moral yang mereka miliki. Pada Pilkada Aceh tahun Political Communication, Dayah Clerics, Aceh Election, Political Participation, Moral Legitimacy 2024, keterlibatan ulama dayah menunjukkan pergeseran peran mereka dari figur moral ke aktor politik yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana komunikasi politik ulama dayah memengaruhi partisipasi politik masyarakat dan membentuk dinamika politik lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah tidak hanya menggunakan metode dakwah tradisional, tetapi juga strategi komunikasi modern seperti media sosial untuk memperluas pengaruh politik mereka. Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada mendukung kandidat, tetapi juga membentuk narasi politik yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat Aceh. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ulama dayah memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan agama, budaya, dan politik, sekaligus menjaga harmoni sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami komunikasi politik berbasis nilai keagamaan, khususnya dalam konteks masyarakat religius seperti Aceh.

Kata Kunci: Komunikasi politik, ulama dayah, Pilkada Aceh, partisipasi politik, legitimasi moral.

ABSTRACT

Dayah clerics in Aceh play a central role in shaping the social and political order through their strong moral legitimacy. In the 2024 Aceh regional election, their involvement highlights a shift from being moral figures to strategic political actors. This study aims to illustrate how the political communication of dayah clerics influences public political participation and shapes local political dynamics. Employing a qualitative approach, this research collected data through in-depth interviews, observations, and thematic analysis. The findings reveal that dayah clerics utilize not only traditional preaching methods but also modern communication strategies, such as social media, to broaden their political influence. Their involvement goes beyond supporting candidates, actively constructing political narratives aligned with Aceh's religious and cultural values. The study concludes that dayah clerics play a pivotal role in integrating religion, culture, and politics while maintaining social harmony. This research contributes significantly to understanding faith-based political communication, particularly in highly religious societies like Aceh.

Keywords: Political communication, dayah clerics, Aceh regional elections, political participation, moral legitimacy

1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat kental, terutama dalam kehidupan sosial dan politik. Tradisi Islam yang mendalam telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Aceh, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di tengah dinamika politik lokal, kekayaan budaya ini turut memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Salah satu ciri khas Aceh adalah peran ulama dayah, yang tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan moral masyarakat (Rahimi & Syaibatul Hamdi, 2023). Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks hubungan antara agama dan politik. Hal ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks hubungan antara agama dan politik. Ulama dayah di Aceh memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk pola pikir dan sikap masyarakat, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Ulama berarti orang-orang yang berilmu atau seseorang dengan pengetahuan yang sangat luas dalam bahasa Arab disebut *al-'allamah* (Zulham & Ristati, 2021). Sebagai tokoh agama yang dihormati, ulama dayah sering menjadi sumber rujukan dalam berbagai hal, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Peran ini semakin terlihat signifikan saat berlangsungnya perhelatan politik, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam situasi ini, masyarakat Aceh cenderung mendengarkan pandangan dan nasihat ulama dayah sebagai panduan dalam menentukan pilihan politik mereka (Rahma et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ulama dayah bukan hanya memiliki otoritas moral, tetapi juga pengaruh politik yang besar.

Dalam konteks politik Aceh, komunikasi politik yang dilakukan oleh ulama dayah menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Sebagai aktor yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat, ulama dayah menggunakan pendekatan yang khas dalam menyampaikan pesan politik mereka. Pendekatan ini tidak hanya berbasis pada prinsip-prinsip agama, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Aceh. Dengan cara ini, ulama dayah mampu menjangkau masyarakat secara efektif, baik di tingkat elit maupun akar rumput. Pengaruh komunikasi politik ini terlihat dalam kemampuan mereka menggerakkan massa dan membangun kesadaran politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Novriansyah et al., 2024). Pilkada Aceh 2024 menjadi momentum penting untuk mengamati secara lebih mendalam peran strategis *ulama dayah* dalam dinamika politik lokal. Dalam masyarakat Aceh yang sangat menghargai otoritas keagamaan, ulama dayah memiliki posisi yang unik dan berpengaruh, tidak hanya dalam ranah spiritual, tetapi juga sosial-politik. Pada ajang Pilkada kali ini, peran mereka tidak terbatas sebagai pemberi fatwa atau penasihat moral, tetapi telah berkembang menjadi aktor politik yang mampu memobilisasi massa dan memengaruhi preferensi elektoral masyarakat. Melalui komunikasi politik yang terstruktur dan berbasis nilai, ulama dayah berhasil menyampaikan pesan-pesan politik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh realitas sosial masyarakat. Pesan-pesan ini kemudian dibingkai dengan prinsip-prinsip keislaman seperti keadilan, amanah, dan maslahat umat, yang menjadi landasan moral sekaligus alat legitimasi terhadap pilihan politik yang mereka usung.

Lebih jauh, komunikasi politik yang dilakukan oleh ulama dayah berperan sebagai jembatan antara demokrasi dan tradisi lokal. Dengan memadukan pendekatan dakwah dan strategi komunikasi modern, mereka mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat—baik yang religius-tradisional maupun yang lebih rasional-politis. Hal ini memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi, karena masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka

disuarakan melalui figur-figur yang mereka percayai secara spiritual dan kultural. Dalam konteks ini, ulama dayah tidak hanya berperan sebagai penyambung pesan politik, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan arah moral dalam kontestasi demokratis. Maka, Pilkada Aceh 2024 tidak hanya dapat dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang kontestasi nilai, di mana ulama dayah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan identitas keislaman masyarakat Aceh.

Secara keseluruhan, komunikasi politik ulama dayah di Aceh mencerminkan hubungan yang harmonis antara politik, agama, dan budaya lokal. Dalam konteks Pilkada Aceh 2024, peran ini menjadi semakin relevan karena mampu menghadirkan stabilitas sosial dan politik di tengah kompleksitas dinamika demokrasi. Studi mengenai komunikasi politik ulama dayah memberikan wawasan penting tentang bagaimana tradisi lokal dapat berkontribusi secara positif dalam proses politik. Dengan demikian, peran ulama dayah tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan identitas budaya dan agama masyarakat Aceh.

Meskipun ulama dayah telah lama diakui memiliki pengaruh signifikan dalam politik lokal Aceh, penelitian yang mendalam mengenai strategi komunikasi politik mereka masih sangat terbatas. Sebagai figur yang dihormati dan menjadi rujukan masyarakat, ulama dayah memainkan peran penting dalam membentuk opini public (Novriansyah et al., 2024). Namun, bagaimana mereka membangun dan menyampaikan pesan politik secara efektif kepada masyarakat Aceh belum banyak dikaji. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya eksplorasi lebih jauh tentang pendekatan komunikasi yang mereka gunakan, terutama dalam konteks Pilkada.

Selain itu, dinamika dan efektivitas komunikasi politik ulama dayah dalam Pilkada Aceh 2024 masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara menyeluruh. Dalam momen politik yang penuh dengan kepentingan dan kompetisi, penting untuk memahami sejauh mana strategi komunikasi ulama dayah memengaruhi masyarakat. Proses penyeimbangan antara pesan politik yang disampaikan dengan nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi di Aceh juga belum terungkap secara jelas. Hal ini menjadi tantangan bagi penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana ulama dayah mempertahankan legitimasi moral sekaligus relevansi politiknya.

Lebih jauh, dampak komunikasi politik ulama dayah terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan keputusan politik mereka juga belum banyak diteliti bahkan mengenai dampak dari cara komunikasi politik ulama dayah dalam politik praktis hingga lebih banyak perolehan suara paslon 02 daripada 01 pun belum ada yang mengungkap. Dalam konteks Pilkada Aceh, peran ulama dayah tidak hanya sebatas menyampaikan pesan, tetapi juga memengaruhi pilihan politik masyarakat. Namun, sejauh mana pengaruh ini terjadi, serta faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilannya, masih menjadi hal yang belum dipahami secara mendalam. Studi yang menyoroti aspek ini dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara agama, budaya, dan politik dalam konteks demokrasi lokal di Aceh.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas peran ulama dalam kehidupan sosial dan politik di Aceh, terutama sebagai penjaga moral dan pembimbing masyarakat (Sunata et al., 2022). Namun, kajian yang secara khusus mengupas strategi komunikasi politik ulama dayah dalam konteks Pilkada masih sangat terbatas. Dalam momen politik seperti Pilkada Aceh 2024, komunikasi politik menjadi aspek penting yang menentukan bagaimana pesan ulama dayah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Kesenjangan ini perlu diisi untuk memahami lebih dalam kontribusi ulama dayah dalam dinamika politik lokal Aceh.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana ulama dayah menyusun, menyampaikan, dan memengaruhi masyarakat melalui komunikasi politik mereka selama Pilkada Aceh 2024. Proses ini melibatkan analisis strategi, media yang digunakan, serta pendekatan yang mereka terapkan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran ulama dayah dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam proses demokrasi.

Kajian ini tidak hanya berupaya mengungkap peran strategis ulama dayah dalam Pilkada, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang hubungan antara agama, budaya, dan politik di Aceh. Dengan menyoroti aspek komunikasi politik, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana ulama dayah mampu membangun partisipasi politik masyarakat secara efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi politik lokal sekaligus memperkaya diskusi tentang hubungan agama dan demokrasi di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena komunikasi politik ulama dayah dalam Pilkada Aceh 2024. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk menggali secara mendalam bagaimana ulama dayah mempengaruhi keputusan politik masyarakat Aceh melalui komunikasi mereka. Dengan fokus pada perspektif lokal, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana pesan-pesan politik yang disampaikan oleh ulama dayah diterima dan dipahami oleh masyarakat Aceh dalam konteks Pilkada (Saka, 2024).

Subjek penelitian terdiri dari ulama dayah terkemuka, tokoh masyarakat, politikus yang merupakan alumni dayah, serta warga Aceh yang terlibat langsung dalam Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengamat. Pemilihan subjek yang beragam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai berbagai perspektif dalam komunikasi politik ulama dayah (Mustafa, 2024). Wawancara mendalam dengan ulama dayah, tokoh politik lokal, serta peserta Pilkada merupakan metode yang sangat penting dalam menggali data yang bersifat kualitatif dan kontekstual terkait dinamika komunikasi politik di Aceh. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis mengenai bagaimana para aktor politik, khususnya ulama dayah, membangun narasi, memilih medium komunikasi, dan menentukan strategi persuasi dalam menyampaikan pesan politik mereka kepada masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam motif, pertimbangan nilai, serta latar belakang sosial dan religius yang melatarbelakangi keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis. Selain itu, wawancara dengan tokoh politik lokal akan mengungkap bagaimana para politisi memandang peran ulama sebagai mitra strategis dalam membangun elektabilitas, serta bagaimana mereka menjalin komunikasi yang selaras dengan kultur keagamaan masyarakat Aceh.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kegiatan politik yang melibatkan ulama dayah. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang akan membantu dalam mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam komunikasi politik ulama dayah. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk memahami pesan politik yang disampaikan oleh ulama dayah serta

dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Aceh dalam Pilkada 2024 (Naudé, 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Result

Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh telah menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam politik praktis mulai pada Pilkada Aceh tahun 2017 dalam pilkada Bupati/Walikota (Rasyidin, 2021). Tahun 2024 ikut mencalonkan diri dalam pemilihan calon Gubernur Aceh yang akan memimpin periode 2025-2030 (Novriansyah et al., 2024). Perubahan ini terlihat dari berbagai aktivitas politik yang mereka lakukan, mulai dari mendukung kandidat tertentu hingga mendirikan partai politik baru yang digagas oleh kelompok alumni dayah. Peran ulama dayah tidak lagi sebatas figur moral yang memberikan nasihat keagamaan, melainkan telah berkembang menjadi aktor politik yang memainkan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan lokal. Hal ini menandakan adanya transformasi signifikan dalam peran sosial ulama dayah, yang kini tidak hanya terbatas pada ruang keagamaan tetapi juga memasuki ruang politik.

Salah satu temuan penting adalah keterlibatan ulama dayah dalam pembentukan partai politik baru yaitu Partai Adil Sejahtera (Sari et al., 2024). Langkah ini mencerminkan upaya mereka untuk memperkuat posisi politik umat Islam di Aceh melalui platform politik yang lebih terorganisir. Partai politik yang dibentuk ini bertujuan untuk menjadi representasi kepentingan masyarakat Aceh yang berbasis nilai-nilai Islam dengan visi amar makruf nahi mungkar dalam politik (Rasyidin, 2021). Dengan demikian, ulama dayah tidak hanya menjadi pendukung bagi kandidat tertentu, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membangun wadah politik yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman.

Dalam konteks komunikasi politik, ulama dayah menggunakan berbagai strategi untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan dakwah tradisional melalui pengajian dan khutbah, tetapi juga mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi. Media sosial memungkinkan mereka menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang menjadi bagian penting dalam basis pemilih. Penggunaan media ini juga menunjukkan kemampuan ulama dayah dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menyampaikan pesan politik secara lebih efektif. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam wawancara dengan Teungku Hasanoel Bashry Pimpinan Dayah Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyyah (MUDI) Samalanga (Hasanoel Bahsry, 2023):

“Ulama dayah menggunakan berbagai cara untuk memperluas pengaruh mereka dalam komunikasi politik. Selain dakwah tradisional seperti pengajian dan khutbah, mereka juga aktif memanfaatkan media sosial. Dengan media ini, mereka bisa menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi muda yang penting dalam pemilu”.

Pesan politik yang disampaikan oleh ulama dayah sering kali memadukan nilai-nilai agama dengan isu-isu sosial dan politik yang relevan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh (Faisal Ali, 2023),

“Pesan politik yang disampaikan ulama dayah itu seperti selalu mengingatkan agar kita berpolitik dengan santun dan beretika, tetap memegang nilai-nilai agama. Misalnya, dalam politik harus mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, politik sebagai media

perbaiki ummat, jangan sampai ambisi politik membuat kita melupakan akhirat, apalagi sampai politik membawa kita ke neraka. Intinya, politik itu harus jadi jalan kebaikan, bukan malah jadi jalan keburukan”.

Strategi politik santun juga terlihat relevan dalam integrasi nilai-nilai religius ke dalam komunikasi politik (Erawadi & Setiadi, 2024). Pesan politik ulama dayah Aceh lainnya seperti yang dikatakan oleh Tu Sop yang mengajak para pendukung dan simpatisannya untuk menghindari tindakan saling menjatuhkan atau mempermalukan lawan politik, dengan tetap menghormati kelebihan dan kekurangan setiap individu (Muntasir & Aminullah, 2020). Pendekatan ini membuat pesan mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat Aceh yang memiliki budaya religius yang kuat. Ulama dayah memanfaatkan legitimasi moral mereka untuk membangun narasi politik yang tidak hanya berfokus pada kemenangan kandidat tertentu, tetapi juga pada peningkatan partisipasi politik masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa komunikasi politik mereka tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Namun, keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah bagaimana mereka dapat menjaga independensi mereka di tengah tekanan politik yang semakin kompleks. Keterlibatan langsung dalam partai politik atau mendukung kandidat tertentu dapat menimbulkan risiko menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ulama dayah, namun untuk koneksi sekarang ini, tingkat kepercayaan masyarakat juga tinggi, hal ini sebagaimana perolehan suara pasangan calon dari kalangan ulama yaitu 1.309.375 suara atau 46,7% (Rasyad et al., 2022). Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara peran mereka sebagai tokoh agama dan aktor politik menjadi hal yang sangat penting.

Di sisi lain, transformasi peran ulama dayah ini juga menunjukkan dinamika politik lokal di Aceh yang semakin kompetitif. Kehadiran mereka dalam politik praktis mencerminkan kebutuhan akan figur yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, ulama dayah dianggap sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan legitimasi moral terhadap proses politik.

Penggunaan strategi komunikasi yang menggabungkan pendekatan tradisional dan modern juga menjadi ciri khas ulama dayah dalam Pilkada Aceh 2024. Mereka tetap memanfaatkan pengajian dan ceramah sebagai media utama untuk menyampaikan pesan politik, tetapi juga mulai mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat jangkauan mereka (Katimin et al., 2020). Menurut Tgk. Mujlisal Kombinasi ini menunjukkan fleksibilitas ulama dayah dalam menghadapi tantangan komunikasi politik di era digital.

Dinamika ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana agama, budaya, dan politik saling berinteraksi di Aceh. Keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis tidak hanya menunjukkan perubahan dalam struktur sosial, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat Aceh merespons perubahan tersebut. Kehadiran mereka dalam Pilkada juga memberikan dimensi religius yang kuat terhadap proses politik, yang membedakannya dari dinamika politik di daerah lain di Indonesia.

Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa ulama dayah memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan sosial yang signifikan. Menurut Dr Musbani, Melalui komunikasi politik ulama dayah, telah mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

politik dengan cara yang lebih bermakna. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada memberikan suara, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Namun, perubahan peran ini juga membutuhkan analisis kritis terhadap dampaknya terhadap masyarakat Aceh. Keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis dapat membawa dampak positif dalam hal pemberdayaan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan polarisasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ulama dayah dapat menjaga keseimbangan antara peran mereka sebagai pemimpin agama dan aktor politik.

b. Discussion

Temuan penelitian ini mencerminkan adanya perubahan yang signifikan dalam dinamika politik di Aceh, terutama dalam konteks peran ulama dayah. Ulama dayah, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin moral dan penjaga nilai-nilai keagamaan, kini memanfaatkan legitimasi moral mereka untuk mendukung posisi politik tertentu (Lubis, 2022). Pergeseran ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana ulama dayah beradaptasi dengan perubahan sosial, tetapi juga menunjukkan upaya mereka untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan legitimasi yang kuat di mata masyarakat, ulama dayah mampu memengaruhi proses politik lokal dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh aktor politik lainnya (Muntasir & Aminullah, 2020).

Keterlibatan langsung ulama dayah dalam politik praktis adalah bukti dari transformasi peran mereka yang semakin kompleks. Peran tradisional sebagai pengajar dan pembimbing keagamaan kini diperluas untuk mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik. Langkah ini menunjukkan bahwa ulama dayah tidak lagi hanya menjadi saksi dari perubahan politik, tetapi juga menjadi penggerak aktif di dalamnya (Rasyad et al., 2022). Dalam konteks ini, ulama dayah tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pembentuk narasi politik yang memengaruhi kebijakan lokal dan arah pemerintahan.

Namun, keterlibatan mereka dalam politik praktis tidak lepas dari tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga independensi mereka sebagai tokoh agama yang dihormati, di tengah tekanan dan kepentingan politik yang sering kali bertentangan. Ketergantungan pada politik praktis dapat menimbulkan risiko menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ulama dayah, terutama jika mereka dianggap terlalu berpihak pada kelompok tertentu hal ini sebagaimana di dapat dalam wawancara tertutup dengan salah seorang ulama tua di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menuntut ulama dayah untuk memainkan peran yang seimbang, yaitu tetap menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan sambil terlibat dalam politik tanpa kehilangan integritas moral mereka.

Selain itu, pergeseran peran ini juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya di Aceh yang semakin dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi. Komunikasi politik yang dilakukan oleh ulama dayah tidak hanya memadukan nilai-nilai agama, tetapi juga memasukkan elemen-elemen modern, seperti penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa ulama dayah telah memahami pentingnya strategi komunikasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi tokoh lokal tetapi juga aktor yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengaruh mereka (Ernawati Ernawati et al., 2024).

Meskipun demikian, keterlibatan ulama dayah dalam politik juga memberikan peluang besar bagi masyarakat Aceh. Peran mereka sebagai tokoh yang dihormati memungkinkan mereka untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam banyak kasus, ulama dayah mampu mengartikulasikan aspirasi masyarakat yang sering kali tidak tersampaikan melalui saluran politik formal. Keberadaan mereka dalam politik praktis juga memberikan dimensi religius yang kuat pada proses politik di Aceh, yang membedakannya dari dinamika politik di daerah lain di Indonesia (Syafieh et al., 2022).

Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan ini juga membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Ulama dayah harus mampu menjaga keseimbangan antara peran mereka sebagai pemimpin agama dan aktor politik agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Hal ini terutama penting dalam masyarakat Aceh yang memiliki ikatan budaya dan agama yang sangat kuat. Jika tidak dikelola dengan baik, keterlibatan ulama dayah dalam politik dapat menimbulkan polarisasi yang berpotensi merusak harmoni sosial di Aceh.

Transformasi peran ulama dayah juga memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara agama dan politik di masyarakat yang religius. Studi ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi faktor budaya, tetapi juga elemen penting dalam membentuk kebijakan dan strategi politik (Saud & Ashfaq, 2024). Dalam konteks ini, ulama dayah berfungsi sebagai simbol legitimasi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan politik modern. Peran ini menempatkan mereka di posisi strategis untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis mencerminkan bagaimana agama, budaya, dan politik saling berinteraksi di Aceh. Dinamika ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang perubahan sosial, tetapi juga menunjukkan pentingnya komunikasi politik yang efektif dalam membangun partisipasi masyarakat. Dengan legitimasi moral yang mereka miliki, ulama dayah memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang mampu mendorong masyarakat Aceh menuju proses politik yang lebih inklusif dan bermakna.

Namun, peran ini juga menuntut tanggung jawab yang besar dari ulama dayah. Mereka harus memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam politik tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peran mereka sebagai pemimpin moral. Oleh karena itu, penting bagi ulama dayah untuk terus memperkuat integritas mereka sambil tetap beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang ada. Studi ini memberikan landasan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang peran ulama dayah dalam politik Aceh dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan utama yaitu menggambarkan bagaimana ulama dayah di Aceh memanfaatkan komunikasi politik dalam Pilkada Aceh tahun 2024 untuk memperkuat pengaruh mereka di ranah politik praktis. Temuan ini menunjukkan bahwa ulama dayah tidak hanya menyampaikan pesan politik melalui pendekatan tradisional, tetapi juga memanfaatkan strategi modern seperti penggunaan media sosial untuk memperluas jangkauan pengaruh mereka. Hal ini membuktikan adanya transformasi peran ulama dayah dari sekadar pemimpin moral menjadi aktor politik yang aktif dan strategis.

Keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis didukung oleh legitimasi moral yang kuat di tengah masyarakat Aceh. Dengan kemampuan mereka mengombinasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan politik modern, ulama dayah berhasil menciptakan narasi politik yang

relevan dan berdampak langsung pada partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ulama dayah memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan lokal sekaligus menjaga harmoni sosial melalui pendekatan komunikasi yang unik dan efektif.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada upayanya dalam menghadirkan perspektif baru yang komprehensif mengenai interseksi antara agama, budaya, dan politik dalam konteks lokal Aceh, khususnya melalui kajian terhadap peran dan strategi komunikasi politik ulama dayah dalam Pilkada. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomenologis keterlibatan ulama dalam politik elektoral, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap transformasi peran mereka dari sekadar figur moral dan spiritual menjadi aktor politik yang aktif dan strategis dalam menentukan arah pilihan publik. Melalui pendekatan ini, studi ini berhasil mengidentifikasi pergeseran paradigma komunikasi keagamaan yang semula bersifat dakwah normatif menjadi komunikasi politik yang bersifat partisipatif dan adaptif terhadap sistem demokrasi modern.

Lebih jauh, penelitian ini menekankan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh ulama dayah, yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal, dapat dijadikan sebagai model ideal dalam mengembangkan partisipasi politik masyarakat religius secara konstruktif dan beretika. Dalam kerangka ini, ulama dayah tidak hanya dilihat sebagai penyampai pesan-pesan politik yang sakral, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-politik yang mampu membentuk opini publik dan memperkuat institusi demokrasi berbasis nilai-nilai religius. Dengan demikian, hasil studi ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan ilmu komunikasi politik berbasis keagamaan (*religious-based political communication studies*) yang sangat relevan untuk diterapkan baik dalam konteks lokal seperti Aceh, maupun dalam ranah nasional yang tengah mencari format ideal keterlibatan agama dalam politik secara demokratis, inklusif, dan bermartabat. Penelitian ini juga membuka ruang untuk pengembangan diskursus akademik lintas disiplin antara ilmu politik, komunikasi, dan studi keislaman dalam melihat dinamika politik lokal yang berakar kuat pada struktur sosial-keagamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga yang telah memberikan fasilitas kepada saya dalam menulis, juga kepada para informan yang telah memberikan informasi sehingga membantu saya dalam menyelesaikan tulisan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Erawadi, E., & Setiadi, F. M. (2024). Transformation of Traditional Islamic Education: Dayah as a Modern Educational Institution in Post-Conflict Aceh. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 225-246. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i2.10110>
- Ernawati Ernawati, Syamsinar Bahar, & Kurniati Kurniati. (2024). Penerapan Etika Politik Rasulullah dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 264-275. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.559>
- Faisal Ali, K. M. P. U. A. (MPU). (2023). *Wawancara*.
- Hasanoel Bahsry, P. D. M. M. R. S. (2023). *Wawancara*.
- Katimin, Syukur Kholil, & Yusfriadi. (2020). The Political Communication Ethics of Traditional Dayah Ulema in Bireuen Regency, Aceh Province. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 2(2), 566-575. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i2.259>
- Lubis, P. (2022). 'Ulama And Umara In The Islamic Political System. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 993. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.999>
- Muntasir, M., & Aminullah, M. (2020). FROM THE RELIGIOUS STAGE TO THE POLITICAL STAGE: TEUNGKU DAYAH'S POLITICAL COMMUNICATION STUDY IN ACEH. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(1), 95-116. <https://doi.org/10.22515/al-balagh.v5i1.2166>
- Mustafa, A. (2024). Islamic personal branding strategies in the 2024 local election in Central Aceh. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 8(3), 685-696. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i3.8992>
- Naudé, L. (2025). Thematic Analysis. In *Flourishing as a Scholar* (pp. 327-350). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197677797.003.0017>
- Novriansyah, M., Zuriah, Z., & Saputra, T. A. (2024). Eksistensi Ulama Dayah Dalam Perpolitikan di Aceh Tahun 2024. *Journal of Government Science Studies*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.30598/jgssvol3issue1page1-8>
- Rahimi, & Syaibatul Hamdi. (2023). PERAN ULAMA DAYAH ACEH MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTENGI MASYARAKAT TERHADAP FAHAM RADIKALISME. *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN*, 31-47. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1227>
- Rahma, A., Rizwan, M., Muzaffarsyah, T., Faisal, N., & Sarifa, S. (2024). The Divergence of the Influence of Ulama and Dayah in the Dynamics of Electoral Politics in East Aceh Regency. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 7(1), 118. <https://doi.org/10.20884/juss.v7i1.11663>
- Rasyad, R., Ikhwan, I., Manan, A., & Putra, R. S. (2022). ULAMA AND POLITICS: A Study of Ulama and Santri's Participation in 2019 General Election in Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 46(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.787>
- Rasyidin, R. (2021). The social political role of Muslim scholars (ulamas) in the Acehnese society. *Journal of Global Responsibility*, 12(1), 1-21. <https://doi.org/10.1108/JGR-10-2018-0040>
- Saka, N. T. (2024). *Social Learning Theory* (pp. 135-162). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5812-2.ch006>
- Sari, E., Rahman, A., Faisal, F., & Muksalmina, M. (2024). DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU

- DAN PARTAI LOKAL. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 159. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.12046>
- Saud, M., & Ashfaq, A. (2024). Shift from Traditional to Contemporary Political Patterns: Knowing the Youth Perspectives on Political Participation. *Journal of Asian and African Studies*. <https://doi.org/10.1177/00219096241235292>
- Sunata, I., Nuzuli, A. K., & Munir, M. (2022). Komunikasi Politik Tokoh Agama Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 (Study Ustadz Abdul Somad). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.29240/jdk.v7i1.4761>
- Syafieh, S., Muhaini, M., & Syufyan, S. (2022). Authority and Ulama In Aceh: The Role of Dayah Ulama In Contemporary Aceh Religious Practices. *Jurnal Theologia*, 33(2), 151-178. <https://doi.org/10.21580/teo.2022.33.2.13455>
- Zulham, & Ristati. (2021). Ecology of Political Communication of Acehnese People towards 2024 Local Election. *International Journal of Qualitative Research*, 1(2), 93-97. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i2.300>